

KEWARGANEGARAAN

Volume 19 : Nomor 02, Nopember 2012

Tinjauan Historis Lembaga Pendidikan Islam
Hapni Laila Siregar

Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran IPS di SD
Risma Sitohang

Internalisasi Nilai Karakter Melalui Pendidikan Politik Generasi Muda
Ramsul Nababan

Trafficking dan Kemiskinan Perempuan
Murni Eva Marlina

Politik Identitas Etnis Dalam Kontestasi Politik Lokal
Budi Ali Mukmin Sarumpaet

Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kebijakan Amerika Serikat
Dalam Memerangi Terorisme
Prayetno

Demokrasi Etis Dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural di Indonesia
Surya Dharma

Analisis Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
di Kabupaten Bangka
Yuli Tirtariandi El Anshori dan Ayi Kiryana

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanis Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Ramsul Nababan, SH

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002


E-mail PPKn@Plasa.com


Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.


Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

Pengantar Redaksiiii


Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

 Tinjauan Historis Lembaga Pendidikan Islam
Hapni Laila Siregar.....1

 Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran IPS di SD
Risma Sitohang.....14

 Internalisasi Nilai Karakter Melalui Pendidikan Politik Generasi Muda
Ramsul Nababan.....26

Analisis Hukum

 *Trafficking* dan Kemiskinan Perempuan
Murni Eva Marlina.....41

Wacana Demokrasi dan Politik

 Politik Identitas Etnis Dalam Kontentasi Politik Lokal
Budi Ali Mukmin Sarumpaet.....52

 Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kebijakan Amerika Serikat
Dalam Memerangi Terorisme
Prayetno.....61

 Demokrasi Etis Dalam Kehidupan Multikultural di Indonesia
Surya Dharma.....78

 Analisis Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di
Kabupaten Bangka
Yuli Tirtariandi El Anshori dan Ayi Karyana.....94

Pengantar

Redaksi

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 19 Nomor 02 Nopember 2012 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 19 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan delapan tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran" yang membahas tentang Tinjauan Historis Lembaga Pendidikan Islam yang diangkat oleh **Hapni Laila Siregar** secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan aktivitas pendidikan karena dengan pendidikan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dapat tercapai. Sejak kedatangannya Islam telah mengembangkan beberapa lembaga pendidikan mulai dari yang informal seperti kuttab dan masjid, juga yang formal yaitu madrasah. *Kuttab* merupakan lembaga pendidikan dasar yang mengutamakan pengajaran baca-tulis. Masjid di samping sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat pengajaran Al-Quran dan hadits. Madrasah lebih diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Disini diajarkan beragam ilmu seperti tafsir, fiqh, kalam, bahasa Arab, sastra, astronomi dan ilmu kedokteran.

Rubrik "Analisis Hukum", yang mengangkat isu tentang *Trafficking* dan Kemiskinan Perempuan yang dibahas oleh **Murni**

Eva Marlina secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan salah satu fenomena global yang terjadi pada masyarakat hingga membuat terjepit dalam ekonomi yang sangat sulit. Dalam pandangan sehari-hari kemiskinan telah menjadi potret bangsa kita bahkan sangat sering mewarnai media cetak maupun media elektronik. Dalam potret kemiskinan ini kaum perempuan yang menjadi dominan sosok kemiskinan. Padahal setiap orang memiliki bakat dan keahlian dalam dirinya hanya kadangkala lupa menggali potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena perlu adanya kajian terhadap permasalahan mengenai *trafficking* dan mencari solusi maupun mengatasi penyebab terjadi *trafficking* sebagai salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama bangsa kita.

Sedangkan rubrik “Wacana Demokrasi dan Politik” yang di tulis oleh **Budi Ali Mukmin Sarumpaet**, mengangkat Issu yang berkaitan dengan demokrasi dan politik tentang Politik Identitas Etnis Dalam Kontestasi Politik Lokal, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa politik desentralisasi yang lahir pada masa reformasi justru membangkitkan gairah sentimen politik identitas etnis yang berkontribusi besar munculnya raja-raja kecil disetiap daerah. Pemikiran Schmitterian menjelaskan dengan adanya liberalisasi politik maka akan kembali mengefektifkan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang ataupun dari pihak ketiga. Pada tingkatan kelompok etnis setidaknya liberalisasi dapat dilihat dari terciptanya ruang-ruang bagi setiap masyarakat untuk membentuk sebuah komunitas yang dirasakan dapat melindungi hak-haknya, dan berkurangnya campur tangan negara terhadap segala bentuk apresiasi politik setiap kelompok.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian dalam bidang pendidikan dan kewarganegaraan, hukum dan sosial politik kenegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah

maupun hasil penelitian dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang pendidikan dan kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi



POLITIK IDENTITAS ETNIS DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL

Oleh : Budi Ali Mukmin Sarumpaet*

Abstract

The decentralization politics that occurred in the era of reformation has encouraged the ambition of the ethnic identity politics which give a big contribution in the appearance of small kings in every region. Schmitterian explained that liberalization politics will activate the certain rights that be owned by each person individually and social groups and cover them from the cruel deeds or the third group. At the level of ethnic at least liberalization can be seen from the availability of spaces for every society to form their own community that can protect their rights, and also the decrease of the intervention of the nation in the political appreciation of every group.

Keywords: Politics Liberalization, Ethnic Identity Politics, Democratic

A. PENDAHULUAN

Hampir setiap daerah di Indonesia pada tahun 2012-2013 serentak melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) baik untuk tingkat Gubernur/Walikota/maupun Bupati. Ironisnya, hampir seluruh kegiatan pilkada yang berlangsung di berbagai daerah menunjukkan sebuah gejala yang sama dimana, geliat politik identitas etnis begitu terasa kuat untuk memperebutkan kekuasaan dalam kontestasi politik lokal. Elit politik lokal yang haus akan kekuasaan sepertinya sengaja memanfaatkan komunitas-komunitas lokal sebagai bentuk akumulasi modal yang sangat berharga yang menjadi mesin pendulang suara ditengah merosotnya kinerja partai politik.

Jika kita berpatokan kepada pemikiran demokrasi yang direkomendasikan oleh O'Donnel dan Schmitter, maka pilkada yang telah bergulir sejak tahun 2004 telah memenuhi standar pembangunan demokrasi di ranah lokal, seperti terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara langsung, terciptanya substitusi kepemimpinan daerah, dan terjadinya pendidikan bagi politik bagi masyarakat luas (Lay: 2005). Hanya saja, pilkada dan prospek

* Budi Ali Mukmin, S.IP., M.A. adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

pembangunan demokrasi di tingkat lokal masih mencemaskan. Daerah-daerah yang tidak memiliki mayoritas etnis dan tidak mendapatkan ruang kebebasan pada masa Orde Baru, justru menjadikan Pilkada sebagai arena pertarungan untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan penguatan politik di masyarakat yang plural. Hasil Lingkaran Survei Indonesia tahun 2008 menyebutkan bahwa, daerah yang tidak memiliki mayoritas etnis seperti Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara politik etnik cenderung menguat dalam pemilihan kepala daerah (LSI :09:2008).

B. BANGKITNYA POLITIK IDENTITAS ETNIS DALAM PILKADA

Keterlibatan etnis dalam ranah politik sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Dekade 1970/1980-an di negara-negara Benua Afrika seperti Nigeria, Somalia, kekuatan etnik mempunyai peranan penting dalam hal penentuan jabatan-jabatan politik. Untuk di Indonesia, geliat etnis untuk masuk dalam ranah politik praktis terjadi setelah liberalisasi politik yang bergulir sejak tahun 1998. Liberalisasi politik menjadi titik awal *-terminus a quo-*(Gaffar: 1999) yang mengawali transisi politik dari penguasa otoriter yang selama ini telah membelenggu hak-hak individual ataupun kelompok tertentu.

Bangkitnya politik etnis dalam pilkada dapat dimaknai dari tidak adanya kepastian demokrasi di tingkat lokal. Dengan kata lain, demokrasi juga memaksa munculnya sebuah kompetisi yang keras untuk dalam hal perebutan kekuasaan. Meminjam istilah yang digunakan oleh Parsudi Suparlan yang tertuang dalam karya Bima Sugiarto bahwa mobilisasi jaringan etnis memang sengaja diciptakan untuk memenangkan sebuah persaingan dalam hal perebutan kekuasaan.

Ada beberapa faktor mengapa tarikan politik etnis semakin kuat dalam sistem pemilihan kepala daerah. *Pertama*, adalah menguatnya fenomena etnosentrisme dalam pemilihan kepala Daerah secara langsung yang acap kali melanggar aturan main dari tata cara demokrasi. Awal kemunculan hal ini sangat mudah ditebak dimana para calon kepala daerah ataupun calon anggota

legislatif yang bertarung dalam sebuah kontestasi politik sangat mengagungkan simbol-simbol identitas yang dijadikan sebagai *vote getter*.

Kedua, dalam hal regulasi dari UU pemilu, khususnya dalam pemilihan anggota legislatif yang berkaitan tentang penetapan calon terpilih. Pada prinsip awalnya penetapan calon terpilih memakai prinsip nomer urut bersyarat. Logikanya adalah sebuah partai yang mendapatkan kursi maka penetapan calon terpilih diberikan kepada nomer teratas, dengan syarat mereka mendapatkan perolehan suara sebesar 30% dari BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Akan tetapi di pertengahan jalan sosialisasi pemilu legislatif beberapa partai politik besar seperti PAN Golkar, PBR dan PD menolak menggunakan sistem penetapan calon terpilih dan cenderung lebih memilih penggunaan sistem suara terbanyak. Perubahan ini ternyata disahkan oleh keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mensahkan sistem suara terbanyak sebagai aturan main dalam pencalonan anggota legislatif.

Disatu sisi keputusan MK ini memang memberikan dampak positif untuk mengurangi oligarkhi dari sebuah partai politik, akan tetapi dilain pihak dari keputusan ini menciptakan sebuah persaingan yang ketat bagi para kontestan yang berkeinginan untuk maju dalam pemilihan anggota legislative maupun menjadi kepala daerah. Di tengah-tengah dekatnya garis ideologi dari masing-masing partai, para calon anggota legislatif dituntut harus lebih kuat untuk menunjukkan karakter kandidat masing-masing. Dalam kondisi seperti ini tampaknya para calon anggota legislatif lebih cenderung bersikap pragmatis, karena program visi dan misi tidak lagi menjadi perhatian dari masyarakat, maka penggunaan jaringan *Patron Clients* sebagai pengikat basis konstituen dan didukung dengan berbagai sumbangan berbentuk uang, maupun berbentuk sembako kerap menjadi pilihan utama bagi para calon anggota legislatif untuk mendapatkan simpati dari masyarakat (Mukmin dan Mubarak : 2009).

Ketiga, ketidakmampuan partai politik di daerah untuk menjalankan fungsi sebagai mana mestinya terkhusus dalam hal *civic education* dan pola

recruitmen politic nya. Ada kesan bahwa partai politik hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk meloloskan kandidat tertentu dalam momen pilkada. Partai politik justru mencari elit-elit politik dari kalangan selebritis ataupun mencaplok elit politik di daerah yang memiliki basis jejaring-jejaring kekerabatan primordial dari paguyuban-paguyuban kelompok tertentu tanpa menghiraukan kualitas dan kapabilitasnya kepemimpinannya. Tak ayal bila saat ini paguyuban-paguyuban di daerah yang memiliki jaringan sampai kelapisan bawah masyarakat menjadi primadona pada saat momen pilkada berlangsung.

Keempat, adalah lemahnya regulasi UU dari No 32/2004 yang tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai batasan dan sanksi hukuman ketika munculnya isu-isu rasialis dalam setiap pilkada.

C. PERGULATAN POLITIK IDENTITAS DALAM PILKADA

Esensi dari etnis merupakan sebuah perwujudan dari politik, selain mengandung nilai-nilai tradisional yang menggunakan corak-corak tertentu, etnis juga merupakan sebagai mekanisme dari pensejajaran politik. Kelompok suku yang lain mungkin saja untuk bersatu untuk memobilisasi di dalam pemilu, untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang baru (Abner Cohen: 83:1996). Sedangkan menurut Max Weber politik etnis adalah sekelompok manusia yang menghormati pandangan serta memegang kepercayaan bahwa asal yang sama menjadi alasan untuk menciptakan suatu komunitas tertentu. Pada perkembangannya sekarang politik ras selalu mempengaruhi negara, karena negara sebagai pihak yang mengalokasikan nilai-nilai yang terkait dengan kekuasaan, status, kemakmuran, serta kesempatan hidup kelompok ras-ras dan anggotanya. Politik etnik/ras dapat dibangkitkan oleh ketidakpuasan sekelompok anggota masyarakat yang terkonsentrasi dalam suatu daerah yang ingin menuntut otonomi lebih besar.

Politik Identitas adalah merupakan sebuah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan (Abdillah : 2002). Kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentifikasi mereka dalam suatu golongan

atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan rasa kebangsaan. Dalam konteks dinamika politik lokal di Sumatera Utara, maka pergulatan politik identitas etnis dalam perebutan tahta kekuasaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan di salah satu Kabupaten Sumatera yakni Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan bagaimana fenomena itu terjadi.

Pemilihan Bupati yang berlangsung pada tanggal 27 juni tahun 2005 secara resmi dimenangkan oleh Haji Tengku Milwan dengan wakilnya Sudarwanto yang dilantik pada tanggal 4 Agustus tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasangan itu mampu menggalang suara pemilih berdasarkan solidaritas etnik dimana Tengku Milwan Berasal dari etnik melayu dan Sudarwanto berasal dari etnik Jawa. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persentase kemenangan HT dan Milwan dan Sudarwanto.

Perolehan Suara Pilkada Langsung di Kabupaten Labuhan Batu 2005

No	Nama Calon Kepala Daerah	Partai Pengusung	Jumlah Suara	Persentase
1	Sa'aludin Alia Enteng	PPP, PDI P	169.698	
2	Tengku Milwan	Golkar, PAN, PKS	211.537	50,51%
3	Amatullah Naas	Koalisi Partai	37.603	

Sumber Data : Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat 2005.

Tidak adanya etnis mayoritas yang mendiami wilayah Kabupaten Labuhan Batu menciptakan sebuah konfigurasi pertarungan politik yang berbeda. Masing-masing kandidat yang terlibat kontestasi dalam pilkada tersebut menjadikan jejaring-jejaring kekerabatan yang berdasarkan kesamaan etnis sebagai *vote getter* untuk mendongkrak perolehan suara. Indikasi itu terlihat ketika etnis melayu dan etnis jawa yang menjatuhkan pilihan politiknya kepada pasangan Tengku Milwan dan Sudarwanto.

Politik identitas kadangkala akan menimbulkan pemikiran yang tidak rasional terhadap perilakunya. Ketidak rasionalitas ini akan terbawa kepada tingkat sensitifitas yang berlebihan terhadap suatu bentuk permasalahan antar

etnis. Tidak rasionalitas juga akan membawa sebuah sifat yang radikal yang membuat suasana politik lokal kian memanas, yang nantinya akan menuju kepada sebuah konflik yang berlarut-larut. Meminjam istilah Benedict Anderson bahwa konsep bangsa Indonesia merupakan sebuah “*imajinasi*” merupakan sebuah konsekuensi yang memang harus diemban bangsa Indonesia ketika keragaman etnis yang selama ini menjadi kebanggaan sebagai pemersatu bangsa dapat menimbulkan sebuah bom waktu atas munculnya berbagai macam konflik komunal ketika masing-masing etnis saling mempertahankan eksistensi ditengah derasnya perubahan arus politik.

D. MIMALISIR PERSINGGUNGAN POLITIK IDENTITAS ETNIS

Riswanda Imawan mengatakan bahwa *Demokrasi*, *Desentralisasi*, dan *Good governance* merupakan tiga pilar utama dalam reformasi politik yang terus diupayakan di Indonesia (Imawan : 2002). Desentralisasi merupakan cikal bakalnya lahirnya pemerintahan lokal, sebab disana terjadi pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah yakni adanya pemerintahan lokal. Sedangkan Demokratisasi adalah sebuah proses dari perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter kearah yang struktur yang dan tatanan yang lebih demokratis. Dalam hal politik identitas tentunya hal ini melahirkan kebebasan yang terjadi didalam masyarakat tanpa mengenal adanya unsure-unsur minoritas dan mayoritas. Sedangkan *Good Governance* di anggap cenderung dimasukkan kedalam unsur-unsur etika.

Di lain pihak Pratikno mengatakan istilah *Governance* dan *Government* cenderung digunakan secara bergantian untuk menggambarkan proses pemerintahan dimana *Government* digunakan untuk merujuk pada pelaku (pemerintah) dan *Governance* biasanya digunakan untuk merujuk pada proses pemerintahan (Pratikno : 2005).

Menurut Horowitz sebagaimana sebenarnya konflik etnis-etnis di negara-negara berkembang sangat berkaitan erat dengan berlangsungnya

modernisasi. Konflik antar etnis terjadi karena ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh beberapa etnis. Ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan kesempatan pendidikan dalam sector modern adalah sebab utama mengapa konflik sering kali terjadi. Disusul dari pergeseran ekonomi kemasalah politik yang akan menimbulkan konflik-konflik antara etnis. Tentunya konflik-konflik ini perlu dikelola dengan cara yang baik agar menjadi sebuah keanekaragaman dalam politik lokal.

Untuk meminimalisir ketidak rasionalitas antar etnisitas ini perlu dibangun sebuah *Consensus Building* yang akan memberikan solusi terhadap segala konflik yang terjadi. Sejenak kita akan menggunakan *governability* (praikno dan Lay : 2006) kedalam tataran pemerintahan lokal dimana kemampuan pejabat daerah untuk menggunakan fasilitas yang dimilikinya, seperti penciptaan *public sphere* yang akan menjamin hak untuk berpartisipasi dan berkompetisi dan sangat toleran terhadap segala perbedaan antar etnis yang ada.

Otonomi daerah yang termaktub dalam UU No 22/1999 memang jauh lebih revolusioner dari pada UU N0 5/1974. Dalam pandangan ini kita sering terjebak dalam sebuah pengertian Otonomi daerah secara utuh. Pada saat sekarang ini otonomi sepertinya hanya sebagai otonomi dari pemerintah pusat pada penerintah daerah, dan bukan kepada otonomi masyarakat lokal itu sendiri. Kenyataan yang sering terlihat adalah otonomi hanya dinikmati oleh golongan elit politik daerah, dan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam beberapa etnis yang akan terus termarginalisasi dalam politik tingkat lokal. Oleh sebab itu konsep otonomi daerah harus menguatkan dan memberdayakan masyarakat lokal yang memiliki .

Kemampuan pemerintahan lokal dalam pengelolaan kepentingan antara etnis yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu sebaiknya mampu menjadi media diantara elit yang ada. selain menyediakan *public sphere*, yang lebih ditekankan adalah rasa penonjolan untuk membangun kabupaten tersebut, dan bukan

kepada etnis mana yang berhak untuk membangun kabupaten tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ada yang menarik dari apa yang pernah diuraikan oleh Lake dan Rothchild (1998) dia menawarkan beberapa point yang menarik jika dipalikesikan di Labuhan batu, *Pertama*, saling menghormati, yaitu, salah satu landasan yang kuat dalam membangun Labuhan Batu untuk maju adalah bagaimana menata hubungan antar etnis kembali bersatu dengan penekanan saling menghormati dan jajaran pemerintahan dan birokrat lokal yang menjadi mediana. *Kedua*, yaitu berbagi kekuasaan dimana pembagian kekuasaan ini penting dalam mengurangi rasa tidak aman bagi dalam skope golongan minoritas. Dengan memberikan keanggotaan secara proporsional dalam pemerintahan lokal. Dan yang *Ketiga* adalah Manajemen konflik untuk mengatasi konflik etnis tersebut dengan menggunakan diplomasi preventif dengan mengedepankan tokoh-tokoh adat yang diantara masing-masing etnis saling mempunyai pengaruh.

E. PENUTUP

Good Governance dalam pengartian tingkat pelaku pemerintahan lokal dan *governability* tingkat kapabilitas pemerintahan lokal dalam memberikan *public sphere* akan membuka peluang bagi pemerintahan lokal yang ada di Labuhan Batu untuk membangun struktur pemerintahan yang berdasarkan pada norma-norma lokal. Kita tidak dapat menutup mata, bahwa masyarakat lokal telah memiliki struktur-struktur tersendiri yang telah lama berdiri sebelum berdirinya struktur pemerintahan.

Kita sama sekali tidak menginginkan negara teater seperti apa yang terbayang dalam negara teater yang terdapat dalam karya Clifford Geertz, yang mengedepankan bahwa etnis mayoritas akan selau menjadi pemimpin, sedangkan etnis minoritas hanya akan menjadi *follower*. Tentunya kearifan lokal dan lebih mengedepan sifat pluralisme menjadi kata kunci untuk lebih menghidupkan kehidupan berdemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, IndonesiaTera, Magelang.
- A. D, Lake dan Rothchild, Donald. 1998. *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation*, Princenton University Press.
- Cohen, A. 1996. “*Etnicity and Politics*”. dalam *Etnicity*. J.Hutchinson dan A.D. Smith (ed). Oxford University Press. New York.
- _____. 1969. *Custom and Politics In Urban Africa*. Routledge. London.
- Agustino, Leo. 2002. *Kekerasan dan Pengendalian Konflik*. Analisis CSIS. Jakarta.
- I. Riswanda. 2002. *Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Sebuah makalah dalam workshop Desentralisasi di Indonesia. Semarang 25-27 Maret.
- Pratikno. 2005. *Good Governance dan Governability*. dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, edisi 3 Maret.

